

Analisis Pengembangan Pariwisata di Bakaro *Beach* untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manokwari

Yusup Anthonimus Mayor, Rully N Wurarah, Mus Mualim*
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua

Article history

Received: September 16, 2020

Accepted: November 12, 2020

*Corresponding Author:

E-mail:

alim.fekon@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the development of tourism in Bakaro Beach in order to increase the Regional Original Income (PAD) of Manokwari Regency. A qualitative descriptive approach is used to describe the tourism development of Bakaro Beach. The samples in this study were the staff of Tourism Office 10 people, 10 people from Bakaro Beach private sector and 30 people from Bakaro Village. The data analysis method used in this research is data triangulation and qualitative descriptive analysis through data reduction, data presentation and verification. The results of this study found that until now the Manokwari Regency Tourism Office does not have a clear tourism development program. Marketing and promotion of tourist objects have been carried out, but there are no clear regulations governing the management of tourist objects so that they cannot be used for increasing PAD in Manokwari Regency. In addition, the infrastructure conditions for tourism development in Manokwari Regency are still inadequate.

Keywords: *Tourism development; Local revenue; Management of tourism objects*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan pariwisata di Bakaro *Beach* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manokwari. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memaparkan pengembangan pariwisata Bakaro Beach dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata berjumlah 10 orang, swasta Bakaro *Beach* sejumlah 10 orang dan masyarakat kampung Bakaro sebanyak 30 orang. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi data dan analisis deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menemukan bahwa sampai dengan saat ini Dinas Pariwisata Kabupaten Manokwari belum memiliki program pengembangan pariwisata yang rinci, telah dilakukan pemasaran dan promosi terhadap objek wisata, akan tetapi belum ada regulasi yang jelas yang mengatur tentang pengelolaan objek wisata sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Manokwari. Selain itu, kondisi infrastruktur bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Manokwari belum memadai.

Kata kunci: Pengembangan pariwisata; Pendapatan asli daerah; Pengelolaan objek wisata

PENDAHULUAN

Pembangunan bidang pariwisata dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, karena sektor pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan di bidang ekonomi. Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor non migas yang diharapkan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian negara usaha mengembangkan dunia pariwisata Indonesia ini di dukung dengan UU No.9 Tahun 1990 dan UU No.10 Tahun 2009 tentang keparawisataan yang menyebutkan keberadaan objek wisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan, antara lain meningkatkan pendapatan (PAD) meningkatkannya taraf hidup masyarakat dan memperluas kesempatan kerja mengingat semakin banyaknya pengangguran saat ini, meningkatkan rasa cinta lingkungan serta melestarikan alam dan budaya setempat (Defilora 2012).

Kabupaten Manokwari merupakan salah satu kabupaten yang sedang berkembang, baik di lihat dari tingkat perekonomian maupun jumlah penduduknya. Selain itu Manokwari adalah ibu kota Provinsi Papua Barat, di mana pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat berada di Manokwari. Kota Manokwari memiliki banyak obyek wisata alam yang ramai di kunjungi wisatawan. Salah satunya ialah wisata Bakaro Beach yang terdapat di Kampung Bakaro wilayah Distrik Manokwari Timur terletak sekitar 12 km dari pusat Kota Manokwari dapat dicapai dengan kendaraan roda empat dan roda dua dalam waktu 30 menit.

Untuk mendukung kegiatan dan perkembangan pantai Bakaro Beach dibutuhkan infrastruktur beserta kondisinya yang baik agar tidak menghambat proses perkembangan pantai Bakaro Beach. Mengingat kondisi jalan masuk menuju lokasi pantai yang kurang baik sampai saat ini belum juga di perbaiki kemudian di pinggiran lokasi pantai Bakaro Beach masih di tutupi banyak tumbuhan pepohonan dan rumput yang sangat lebat. Hal ini membutuhkan perhatian khusus dari pengusaha tersebut terutama untuk kelancaran usaha dan menarik minat pengunjung maka harus adanya perbaikan pada jalan tersebut.

Bakaro *Beach* merupakan pantai yang memiliki hamparan pasir putih dengan air laut yang berwarna biru kehijauan. Dulunya pantai ini adalah pantai yang tidak berpenghuni sampai pada akhirnya masyarakat desa Bakaro membuka lahan semak-semak dan menemukan pantai yang memiliki keindahan alam ini. Berkunjung ke pantai Bakaro Beach akan menjadi hal yang istimewa, karena sebelum sampai ke pesisir pantainya pengunjung akan menyusuri perjalanan melalui daerah desa Bakaro yang hijau dan indah. Pemilik hak ulayat tanah sekaligus kepala desa kampung Bakaro bapak Agus Meidodga sudah memberikan tanah adat ini untuk di kelola menjadi tempat wisata yaitu Bakaro *Beach* dan status wisata Bakaro *Beach* sendiri merupakan sudah bukan tanah adat. Sejak dibuka wisata

ini yang di kelola sendiri oleh bapak Mamad Suhadi selaku pemilik dan pengelola tempat wisata Bakaro *Beach* tempat wisata ini sudah memiliki fasilitas pendukung yaitu satu ruang aula, tiga kolam renang (untuk dewasa, anak-anak, bayi), enam kamar ganti, dua wc umum, sepuluh tempat sampah, sepuluh *home stay*, papan peringatan dan beberapa spot foto yang lagi terkenal di Manokwari.

Jumlah wisatawan yang datang ke tempat wisata Bakaro *Beach* rata-rata pada hari libur seperti sabtu - minggu 50-200 orang, sedang untuk setiap hari biasa 20-50 jiwa. Kemudian setiap minggu ada kegiatan ekstrakurikuler pada hari Jumat dari SMA Negeri 1 berjumlah 20-30 orang, kemudian dari Kodam setiap tahun untuk calon militer 200 jiwa, dan dari Polda juga setiap tahun 200 orang. Jumlah pengunjung ke tempat wisata Bakaro Beach tidak menentu dan tarif masuk untuk anak Rp.20.000,- dan dewasa Rp.30.000,- Jumlah pendapatan berkisaran Rp.15.000.000,- yang terdiri dari Sewa gedung serba guna Rp.6.000.000,- (3 kali pemakaian selama 1 bulan) Jumlah pengunjung 50-200 orang selama 1 bulan Rp.9.000.000,- untuk jumlah pengunjung sebanyak 180 jiwa setiap bulan nya Berdasarkan perincian pendapatan di atas dana tersebut digunakan untuk pemeliharaan (*maintenance*) seluruh aset di Bakaro Beach yaitu untuk mengganti alat-alat yang rusak, biaya pulsa listrik, gaji karyawan, biaya kebutuhan administrasi, biaya pemeliharaan/kebersihan kolam dan kamar mandi, wc, lingkungan area wisata Bakaro *Beach*, dan kewajiban membayar semua pajak sedangkan untuk masyarakat di berikan kesempatan mengelola jasa parkir untuk menambah penghasilan mereka¹.

Namun selama didirikannya wisata Bakaro Beach ini, belum juga ada perubahan pada perekonomian dan pembangunan dalam kehidupan masyarakat kampung Bakaro. Yang saat ini hanya terlihat adanya perubahan pada kampung tersebut adalah pembangunan talud pada pinggiran pantai dan itu pun dibangun oleh Pemda Manokwari dan bukan dari pengusaha Bakaro Beach. Pengembangan objek wisata bakaro ini sangat terkait dengan masing-masing individu dalam hal ini adalah wisatawan masyarakat lokal dan juga campur tangan pemerintah setempat. Selain itu ketersediaan sarana dan prasarana pendukung juga menjadi pertimbangan dan daya tarik seseorang untuk memutuskan berkunjung pada sebuah objek wisata.

Kualitas objek wisata tidak hanya dapat dinilai dari kondisi objek wisata itu sendiri, namun dilihat juga dari fasilitas, pelayanan, jasa, pemasaran, dan aksesibilitas yang mendukung objek wisata tersebut. Sehingga menyadarkan pemerintah, pengusaha-pengusaha,

¹ Pihak Pengelola Tempat Wisata Bakaro *Beach*

dan masyarakat sekitar akan penting menjaga dan melestarikan alam pantai sebagai daerah tujuan wisata. Pengembangan wisata Bakaro Beach merupakan tanggung jawab bersama karena merupakan aset daerah di bidang pariwisata. Maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis pengembangan pariwisata Pantai Bakaro Beach terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manokwari.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di tempat wisata Bakaro Beach Kampung Bakaro Dsitrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama 1 bulan dan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjawab permasalahan yang sedang di amati. Metode deskriptif didefinisikan sebagai kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu sekarang atau waktu sedang berjalan dari objek penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema dan gambar (Sugiyono, 2003). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memaparkan pengembangan pariwisata pantai Bakaro Beach terhadap pendapatan asli daerah. Objek penelitian ini adalah wisata pantai Bakaro Beach dan Subjek dari penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Manokwari, Pemilik objek wisata Bakaro Beach dan masyarakat yang bermukim di Kampung Bakaro Dsitrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil responden perlu di sajikan dalam penelitian ini guna untuk menggambarkan keadaan atau kondisi responden yang dapat memberikan informasi tambahan untuk mamahami hasil penelitian. Penyajian data deskriptif penelitian ini bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian ini.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	jumlah (orang)	Presentase %
1	Pelajar/mahasiswa	6	20%
2	PNS	2	7%
3	Swasta	1	3%
4	Wiraswasta	2	7%
5	Ibu rumah tangga	6	20%
6	Lainnya	13	43%
	Total	30	100%

Sumber :data primer diolah, 2019.

Berdasarkan keterangan tabel 1 dapat di jelaskan bahwa jumlah responden berdasarkan jenis pekerjaan pada pelajar/mahasiswa sebanyak 6 orang atau 20 persen, PNS sebanyak 2 orang atau 7 persen, swasta sebesar 1 orang atau 3 persen, wiraswasta sebanyak 2 orang atau sekitar 7 persen, ibu rumah tangga sebanyak 6 orang atau 20 persen dan lainnya sebesar 13 orang atau 43 persen. Pada jenis pekerjaan ini yang paling banyak responden terdapat pada pekerjaan lain-lainnya sebanyak 13 orang atau 43 persen dan yang paling rendah terdapat pada pekerjaan swasta sebanyak 1 orang atau 3 persen.

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah (orang)	Presentase %
1	Pria	22	73%
2	Wanita	8	27%
	Total	30	100%

Sumber :data primer diolah,2019.

Berdasarkan keterangan pada tabel 2 menjelaskan bahwa jumlah responden berdasarkan jenis kelamin paling tinggi adalah pria sebanyak 22 orang (73%) dan responden wanita paling rendah sebanyak 8 (27%) hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk kampung bakaro yang di ambil sebagai responden adalah pria sebanyak 22 orang (73%).

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah (orang)	Presentase %
1	10 – 20 tahun	4	14%
2	21 – 30 tahun	6	20%
3	31 – 40 tahun	7	23%
4	41 – 50 tahun	7	23%
5	>50 tahun	6	20%
	Total	30	100%

Sumber: data primer diolah,2019.

Berdasarkan keterangan tabel 3 di atas dapat terlihat bahwa usia dari responden masyarakat kampung bakaro yang di jadikan responden yang umurnya kurang dari 10 - 20 tahun ada 4 orang (14%), yang umurnya di antara 21 - 30 tahun ada 6 orang (20%), yang usianya diantara 31 - 40 tahun ada 7 orang (23%), yang umurnya di antara 41 - 50 tahun ada 7 orang (23%), dan yang umur lebih dari 50 ada 6 orang (20%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berumur di antara 31 - 40 tahun dan 41 -50 tahun.

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan terakhir	Jumlah (orang)	Presentase %
1	Tidak tamat SD	1	3%
2	SMP	4	14%
3	SMA	25	83%
	Total	30	100%

Sumber: data primer diolah,2019.

Berdasarkan keterangan tabel 5.4 di atas menunjukkan bahwa pendidikan terakhir masyarakat kampung Bakaro yang menjadi responden yaitu Tidak tamat SD 1 orang (3%), pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) 4 orang (14%), pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) 25 orang (83%). Maka dapat di katakan bahwa pendidikan terkakhir sebagian besar responden adalah SMA (Sekolah Menengah Atas) sebanyak 25 orang (83%).

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Asal Suku

No	Asal Suku	Jumlah (orang)	Presentase %
1	Biak	15	7%
2	Wasior	1	3%
3	Serui	2	7%
4	Mandobo(bouvendiguel)	2	50%
5	Meyah	6	7%
6	Jawa	2	7%
7	Bugis	1	3%
8	Makasar	1	3%
	Total	30	100%

Sumber: data primer di olah 2019.

Berdasarkan keterangan tabel 5 di atas menjelaskan jumlah responden berdasarkan asal suku yaitu suku biak ada 15 orang (50%) suku wasior ada 1 orang (3%) suku serui ada 2 orang (7%), suku mandobo (bouvendiguel) ada 2 orang (7%), suku meyah ada 6 orang (7%), suku jawa ada ada 2 orang (7%), suku bugis ada 1 orang (3%), dan terakhir suku makasar ada 1 orang (3%). Hal menunjukan bahwa jumlah responden berdasarkan asal suku yang paling tinggi adalah suku biak sebanyak 15 orang (50%) dan yang paling terendah ada 3 suku yaitu suku wasior, bugis dan makasar masing 1 orang (3%).

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan

No	Pendapatan (Rupiah)	Jumlah (orang)	Presentase %
1	500.000 – 1.000.000	8	27%
2	1.100.000 – 2.000.000	6	20%
3	belum memiliki pendapatan	16	53%
	Total	30	100%

Sumber: data primer diolah,2019.

Berdasarkan keterangan tabel 6 dapat dilihat jumlah pendapatan dari responden masyarakat kampung bakaro yaitu dari 500.000 - 1.000.000 ada 8 orang atau 27 persen, 1.100.000 - 2.000.000 ada 6 orang (20 persen), belum memiliki pendapatan 16 orang (53 persen). Hal ini menunjukkan jumlah responden berdasarkan pendapatan paling tinggi adalah mereka yang belum memiliki pendapatan sebanyak 16 orang (53 persen) dan paling rendah adalah mereka yang memiliki pendapatan berkisar 1.100.000 -2.000.000 sebanyak 6 orang (20 persen).

Pengembangan Pariwisata di Pantai Bakaro Beach Terhadap PAD Kabupaten Manokwari

Pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan dalam upaya peningkatan PAD, terkait dengan upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam pengembangan objek wisata untuk meningkatkan PAD kabupaten Manokwari dijelaskan oleh responden dari Dinas Pariwisata sebagaimana kutipan berikut :

“Setiap tahun kita memprogramkan adanya kegiatan penataan di beberapa objek wisata andalan kabupaten manokwari. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan adanya perbaikan fasilitas objek wisata sehingga ,emberi kenyamanan bagi pengunjung”

Berdasarkan informasi di atas apa yang di ketahui setiap ada penyusunan program dan kegiatan penataan pada bebarapa objek wisata yang terdapat di kabupaten manokwari. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar peningkatan dalam fasilitas objek wisaa bakaro beach. Apa bila fasilats dalam kondisi baik, jumlah pengunjung parawisat akan meningkat, sehingga pada akhirnya meningkatkan PAD namun demikian, terkait dengan upaya peningkatan PAD melalui pengembangan sektor parawisata dinas parawisata menjelaskan:

“sampai saat ini dinas parawisata bisa melakukan pemungutan retribusi”

Hal ini disebabkan belum ada regulasi yang mengatur tentang pemungutan retribusi tempat wisata, perda terkait terkait retribusi masih dalam proses. Dalam pelaksanaan pengembangan , pihak pemerintah telah melakukan perencanaan sebagai upaya untuk meningkatkan PAD kabupaten Manokwari hal ini di ketahui dari informasi bahwa

“Dinas parawisata telah membuat master plan perencanaan, penataan, dan pengembangan objek wisata salah satunya wisata bakaro beach agar pembangunan dan pengembangan objek wisata dapat terarah , fokus, dan terintegrasi dengan kegiatan sektor lainnya di sekitar lokasi objek wisata.”

Pemerintah telah melakukan upaya yang matang dalam menyusun perencanaan bagi pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD kabupaten manokwari sebagaimana informasi yang di dapat sebagai berikut

“mensinergikan perencanaan antar pihak eksekutif, legislatif, dalm hal pembiayaan kegiatan dengan pihak ketiga dalam hal ini para kontarktor.juga kita kamunikasi dan kita tawarkan potensi wisata yang kita miliki dengan harapan investor akan berinvestasi di bidang parawisata Kabupaten Manokwari”

Informasi di atas menunjukkan bahwa perencanaan disusun dengan melibatkan berbagai pihak antara lain pihak eksekutif,legislatif dan para kontraktor sebagai pihak ketiga.dinas parawisata juga menjalin hubungan baik dengan invenstor hal ini dilakukan agar dengan harapan investor tertarik berinvestasi dibidang parawisata di kabupaten Manokwari.

Sampai pada tahap perencanaan, pengembangan parawisata di kabaupaten Manokwari dilakukan dengan cukup baik akan tetapi kelemahan dari pengembangan ini terjadi karena tidak adanya regulasi yang jelas terkait secara langsung dengan pengembangan parawisata hal ini di ungkapkan oleh bagian dinas pariwisata berikut kutipan kalimatnya :

“Belum ada regulasinya karena kita belum melihat geliat wisata di kabupaten manokwari terhadap wisata Bakaro Beach”

Berdasarkan penjelasan tadi dapat diketahui belum ada regulasi yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan pengembangan objek wisata sebagai upaya meningkatkan PAD kabupaten Manokwari. Tanpa adanya regulasi tentunya tidak ada program yang dapat dijalankan secara efektif guna mengoptimalkan potensi wisata yang dimiliki kabupaten Manokwari. Pengembangan yang sudah dilaksanakan sampai dengan saat ini adalah program dari dinas parawisata kabupaten Manokwari. Dalam melaksanakan pengembangan yang selama di programkan oleh dinas pariwisata kabupaten manokwari, dinas tersebut telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar objek wisata hal ini dapat di lihat dari kutipan berikut :

“Tentu, ada setiap tahun ada program dan kegiatan yang dilakukan baik pelaksanaan event-event wisata daerah, promosi wisata daerah ke mancanegara ke tingkat nasional, dan sosialisasi ke masyarakat di sekitar objek wisata”

Lebih lanjut terkait dengan sosialisasi pengembangan objek wisata dapat diketahui dari kutipan berikut :

“Melalui pelaksanaan even-even wisata daerah, melakukan pemilihan duta wisata daerah,promosi ke media massa,elektronik, dan brosur-brosur yang ada”

Berdasarkan informasi di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah daerah melalui dinas pariwisata di kabupaten Manokwari sudah terlaksana dengan cukup baik. Sosialisasi program pengembangan wisata dan objek wisata di kabupaten Manokwari dilakukan melalui even-even wisata daerah dan juga promosi wisata. Promosi wisata sendiri merupakan bentuk pemasaran terhadap periwisata di kabupaten Manokwari. Terkait dengan pemasaran terhadap objek wisata kabupaten Manokwari. Berikut kutipan dari responden dinas pariwisata :

“iya,struktur kita ada satu seksi yang membidangi masalah promosi dan dan penyuluhan wisata. Seksi ini lah yang bekerja melaksanakan tupoksinya untuk melakukan promosi wisata dalam rangka melakukan pemasaran pariwisata baik secara nasional maupun manca negara”

Di dinas pariwisata kabupaten Manokwari ada bagian tersendiri yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap promosi wisata di kabupaten Manokwari. Promosi terhadap pariwisata kabupaten Manokwari telah dilakukan baik secara nasional dan mancanegara. Upaya promosi wisata dinilai cukup memberikan hasil. Dengan adanya promosi wisata,tentunya lebih baik banyak masyarakat yang mengetahui tentang potensi pariwisata di kabupaten Manokwari. Hal ini di ungkapkan responden dinas kabupaten Manokwari:

“ tentu ada hasilnya, karena dari satu sisi promosi,objek dan potensi wisata banyak masyarakat yang belum tahu akhirnya menjadi tahu terhadap potensi wisata yang ada di kabupaten Manokwari ”

Sampai dengan saat ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Manokwari telah melaksanakan beberapa program pengembangan objek wisata namun demikian, pengembangan yang dilaksanakan masih bersifat parsial karena tidak fokus pada salah satu objek wisata saja. Berikut ungkapan salah satu pegawai dinas pariwisata terkait pengembangan pariwisata :

“ pengembangan objek wisata masih bersifat parsial. Artinya, pengembangan objek wisata tidak fokus pada salah satu objek saja karena belum ada objek wiisata yang dikelola secara profesional. Kedepan akan dilakukan secara profesional dengan melibatkan piha ketiga untuk mengelola objek wisata secara profesional ”

Dengan demikian dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini belum ada program pengembangan yang berjalan instruktur dan sistematis untuk mencapai tujuan berupa adanya objek wisata yang dikelola secara profesional cuman satu objek wisata yang masuk dalam program pengembangan objek wisata yaitu wisata pantai Pasir Putih. Tanpa adanya pengelolaan objek pariwisata yang dilaksanakan secara profesional tentu tidak ada pula kontribusi yang terukur dan berarti dari sektor pariwisata terhadap PAD kabupaten

manokwari. Adapun program yang telah dilaksanakan dalam pengembangan pariwisata adalah program penataan dan pengembangan objek wisata yang ada diseksi objek dan sarana wisata yang sementara di fokus pada satu objek wisata yaitu pantai pasir putih.

Pada dasarnya dalam pengembangan objek wisata tentunya ada beberapa faktor yang dapat mendukung pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut diantara lain saran dan prasarana pihak yang terlibat, anggaran, dan kerja sama antar dinas terkait. Sarana dan prasarana yang di butuhkan dalam pengembangan objek wisata yang satu dengan objek wisata yang lainnya tentu berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi objek wisata itu sendiri, berikut informasi dari, dinas pariwisata :

“ karena masing-masing objek wisata berbeda karakteristiknya maka tentu berbeda juga sarana dan prasarana yang dibutuhkan masing-masing objek wisata”

Pendapat diatas dapat dibenarkan mengingat bahwa karakteristik setiap objek wisata yang berbeda-beda. Adapun pihak yang terkait dalam pengembangan pariwisata di kabupaten Manokwari dapat diketahui dari wawancara berikut

“ pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan objek wisata adalah pertama bupati dan perangkat teknis di eksekutif, kedua ketua DPR dan perangkat teknis di eksekutif, ketua DPRD dan perangkat komisi yang membidangi pariwisata, pihak ketiga yang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan proyek pengembangan wisata”

Melalui kutipan di atas di ketahui pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata antara lain perangkat eksekutif, legislatif, dan juga pihak swasta yang melaksanakan kegiatan-kegiatan proyek pembangunan objek wisata. Untuk melaksanakan pengembangan pariwisata juga sangat dibutuhkan anggaran yang cukup. Kecukupan anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah untuk pengembangan pariwisata dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut :

“ anggaran yang diberikan tentu tidak mencukupi untuk mengembangkan objek wisata karena banyaknya objek wisata yang harus mendapat perhatian untuk di perbaiki dan di benahi inilah yang menjadi tantangan dalam memperbaiki sistem penataan dan pengembangan objek wisata ”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa anggaran yang dapat digunakan dalam mengembangkan sektor pariwisata belum mencukupi. Apabila dibandingkan dengan banyaknya potensi dan objek wisata yang terdapat di kabupaten Manokwari, maka anggaran yang dialokasikan bagi pengembangan objek wisata masih sangat kurang, namun demikian masih faktor pendukung lain bagi pengembangan pariwisata di kabupaten Manokwari, yaitu kerja sama antar dinas terkait. Melalui kuisisioner dan

wawancara yang dilaksanakan peneliti dinas pariwisata sudah melakukan kerja sama dengan dinas sudah sangat baik sekali seluruh dinas terkait telah bersinergi untuk melaksanakan tugasnya masing-masing dalam pelaksanaan program pengembangan pariwisata.

Pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan dalam upaya peningkatan PAD, terkait dengan upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam pengembangan objek wisata untuk meningkatkan PAD kabupaten Manokwari. Dalam proses penunjukan pihak swasta selaku pengelola wisata bakaro beach juga turut melibatkan masyarakat, hal ini dapat di lihat dari kutipan berikut :

“ dibentuknya badan pengelola objek wisata oleh kelompok kecil masyarakat atau swasta yang disetujui oleh pemerintah kecamatan”

Penunjukan pihak swasta juga dilakukan melalui proses yang panjang sebagaimana dijelaskan dalam kutipan berikut:

“ proses melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat dan melakukan kerja sama dengan dinas terkait proses penetapan dan pembangunan wisata ini”

Berdasarkan kutipan diatas wawancara di atas dapat diketahui bahwa kerja sama dengan pihak swasta hanya dalam pembangunan dan peningkatan sarana saja, bukan dalam pengelolaan objek wisata.

Analisis Hasil Penelitian

Sampai dengan saat ini belum ada program pengembangan sektor pariwisata yang jelas dan terencana yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan objek wisata. Hal ini disebabkan belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sektor pariwisata di kabupaten Manokwari. Pada masa yang akan datang, pihak pemerintah melalui dinas pariwisata akan menyusun suatu regulasi atau peraturan untuk pengelolaan yang diserahkan ke pihak ke tiga secara lebih profesional. Tanpa adanya regulasi yang jelas, pengaturan terhadap pelaksanaan pengelolaan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Manokwari tidak dapat berjalan dengan baik penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Trianingsih Widiati tahun 2016 tentang “Upaya Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulungan”

Dinas Pariwisata Kabupaten Manokwari telah melakukan berbagai upaya untuk memasarkan dan mempromosikan objek wisata baik melalui leaflet, brosur, maupun pameran-pameran yang diikuti. Namun sampai dengan saat ini Dinas Pariwisata tidak dapat menarik retribusi masuk objek wisata, tidak adanya retribusi ini disebabkan karena belum adanya peraturan yang mengatur tentang penarikan retribusi tersebut.

Berdasarkan kondisi mengenai pengelolaan objek wisata di kabupaten Manokwari maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan objek wisata belum berhasil meningkatkan PAD. Kondisi ini terjadi karena belum adanya peraturan untuk menarik retribusi objek wisata tersebut. Namun demikian, pemasaran yang dilakukan sudah cukup baik, pada dasarnya, objek wisata di kabupaten manokwari memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan PAD kabupaten Manokwari.

Seharusnya Kabupaten Manokwari mampu menjadi daerah tujuan wisata yang sangat berpotensi. Hal ini disebabkan banyaknya objek wisata pada daerah ini, baik wisata alam dan juga wisata budaya. Daya tarik wisata dapat di manfaatkan untuk meningkatkan kunjungan wisata terutama berkaitan dengan kabupaten Manokwari yang merupakan ibu kota provinsi Papua Barat yang terdiri daerah pesisir pantai yang indah salah satunya Pantai Bakaro dan Pegunungan Arfak.

Pada dasarnya Dinas Pariwisata Kabupaten Manokwari telah melakukan berbagai upaya dalam pengembangan pariwisata tersebut belum dapat dikatakan maksimal. Hal ini dapat diketahui dari belum adanya program pengembangan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan PAD. Hasil temuan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Novi Yanti (2018) tentang Analisis Pengembangan Sektor Pariwisata di Kota Padang. Novi Yanti menemukan bahwa sektor pariwisata di Kota Padang telah mengalami perkembangan yang baik terlihat dari peningkatan jumlah penduduk yang datang ke objek wisata. Selain itu Pemerintah Kota Padang bersama dengan Dinas Pariwisata juga terus melakukan upaya pengembangan dengan cara melakukan revitalisasi di objek wisata, program pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan prouk kepariwisataan daerah serta pengembangan promosi wisata di berbagai media sosial dan juga website.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Hasil pajak daerah, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan lain-lain.
2. Hasil retribusi daerah, antara lain retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, retribusi terminal, dan lain-lain.
3. Hasil perusahaan milik daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bank pendapatan daerah, perusahaan air minum, perusahaan daerah percetakan, penyertaan modal pada pihak ketiga dan lain-lain.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain penjualan barang milik daerah, jasa, giro, dan lain-lain.

Uraian diatas menunjukkan bahwa terdapat 4 sumber PAD di antara ke empat sumber tersebut, terdapat 2 sumber PAD yang berhubungan secara langsung dengan sektor pariwisata, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Sampai dengan saat ini kedua sumber tersebut belum memiliki kaitan secara langsung dengan pariwisata Kabupaten Manokwari. Oleh karena itu untuk masa yang akan datang perencanaan yang lebih matang dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Manokwari agar lebih di fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pemanfaatan lahan dalam pengembangan objek wisata Bakaro *Beach* sebagai upaya untuk meningkatkan PAD kabupaten Manokwari responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 40 persen hal di karenakan masyarakat merasa dengan adanya wisata ini selain menghadirkan susanana yang baru dapat juga membantu menambah penghasilan mereka dari pengunjung yang datang dan berbelanja di sana. Sedangkan paling rendah adalah tidak setuju sebanyak 23 persen dengan sebagian masyarakat berpendapat bahwa harusnya ada hasil yang di berikan kepada masyarakat sekitar. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irhamna (2017) yang melihat ‘Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Perekonomian Masyarakat Sekitar Objek Wisata di Dieng Kabupaten Wonosobo. Hasil studinya menunjukkan bahwa dengan adanya pengembangan pariwisata pendapatan masyarakat sekitar mengalami peningkatan dari 52,3 persen menjadi 68,5 persen sedangkan untuk tingkat kesempatan kerja masih rendah dengan angka 29,5 persen.

Upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat sekitar menyetujui pemanfaatan lahan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD kabupaten Manokwari. Jumlah pendapat paling tinggi adalah tidak berupaya sebanyak 43 persen hal dikarenakan masyarakat hanya mengetahui mulai proses pengambilan lahan hingga pembangunan hanya terjadi antara masyarakat adat dan pihak pemilik wisata Bakaro Beach. Hasil penelitian ini searah dengan hasil temuan Kurey dkk (2019) pada penelitian Potensi Jasa Lingkungan Pada Kawasan Taman Wisata Alam Klamono, Kabupaten Sorong yang menulis bahwa selama ini dari pihak pemerintah dan balai besar konservasi sumberdaya hutan masih belum ada kesepakatan tentang status kawasan Taman Wisata alam Klamono dengan pemegang hak ulayat (Mambringgofok). Sejauh ini baru diadakan pendekatan kegiatan dari BBKSDH melalui pembentukan kelompok tani hutan, mitra polhut di Kampung Klawana, Kampung Klamono dan Wonosari.

Masyarakat merasa tidak terganggu atau justru senang dengan pemanfaatan lahan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD kabupaten Manokwari. Dengan persentase jawaban paling tinggi adalah sangat terganggu sebanyak 53% dengan alasan merusak lingkungan pantai dan tidak memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar. Hasil penelitian ini sedikit berbeda dengan hasil temuan pada studi yang dilakukan oleh Kurey dkk (2019) dalam penelitiannya mengenai 'Potensi Jasa Lingkungan Pada Kawasan Taman Wisata Alam Klamono, Kabupaten Sorong' yang menulis bahwa berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan responden kunci dan responden umum yang berdomisili di Kampung Klawana, sebagian besar menyetujui apabila Taman Wisata Alam Klamono dikembangkan dan dilestarikan secara baik.

Masyarakat juga berupaya menjaga keamanan disekitar objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD kabupaten Manokwari. Pilihan responden paling tinggi adalah cukup berupaya 53 persen sebagian besar masyarakat sangat aktif dalam menjaga wisata ini walaupun tidak terlalu kelihatan bagi pemilik mulai dari menjaga dan melindungi setiap pengunjung yang datang berliburan hingga pulang tanpa merasa di ganggu.

Upaya yang dilakukan dalam menjaga keamanan disekitar objek wisata sudah sangat membantu, sebagai upaya untuk meningkatkan PAD kabupaten Manokwari. Dari hasil di atas menunjukkan pilihan jawaban paling tinggi adalah Sangat membantu sebanyak 44% hal ini karena masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam menjaga dan mengelola objek wisata Bakaro Beach. Hasil temuan ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurey dkk (2019) yang menemukan bahwa pada pengelolaan dan keamanan Taman Wisata Alam Klamono di Kabupaten Sorong masih banyak terjadi pelanggaran misalnya penebangan liar yang disengaja (*illegal logging*) dan perambahan hutan (penggunaan lahan).

Lingkungan disekitar objek wisata Bakaro Beach sebagai wisata pengembangan untuk PAD Manokwari tergolong aman. Pilihan cukup aman paling tinggi sebanyak 76% karena masyarakat juga turut menjaga keamanan di daerah sekitar wisata seperti keterangan salah seorang responden bapak Agus mengatakan : kami juga turut menjaga keamanan disini kalau ada orang dari luar atau anak-anak kami yang mabuk lalu mengganggu maka kami yang turun tangan karna wisata ini milik kita bersama. Hasil temuan ini sedikit berbeda dengan hasil studi Irhamna (2017) yang menyatakan bahwa dengan adanya pengembangan objek wisata menimbulkan dampak pada menurunnya kualitas kebersihan dan keamanan di sekitar objek wisata.

Masyarakat ikut berperan mengelola objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD kabupaten Manokwari. Menunjukkan pilihan jawaban paling tinggi adalah cukup

berperan sebanyak 70 persen hal ini di karenakan masyarakat juga di beri kesempatan ikut mengelola dan merasakan objek wisata Bakaro Beach. Penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Sari dan Widiyastuti (2020) tentang ‘Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Kampung Wisata Rejowinangun Kotagede Yogyakarta’ yang menulis bahwa usaha yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan atraksi wisata adalah masyarakat menjadi pengelola kampung wisata, ikut serta dalam pertunjukan atraksi wisata, masyarakat menjadi pengrajin untuk membuat kerajinan dan oleh – oleh, masyarakat melestarikan budaya setempat, memberikan pelatihan terkait dengan atraksi wisata bahkan turut serta dalam mempromosikan potensi yang ada di kampung wisata.

Tanggapan masyarakat mengenai kesempatan untuk ikut mengelola objek wisata Bakaro Beach dalam meningkatkan PAD kabupaten Manokwari, hasil wawancara menunjukan responden yang merasa sangat senang sebanyak 13 persen dan cukup senang sebanyak 87 persen. Pilihan jawaban paling tinggi adalah cukup senang sebanyak 87 persen hal di karenakan masyarakat bukan hanya di berikan kesempatan ikut mengelola tapi juga dapat merasakan wahana yang yang di dalam wisata Bakaro Beach. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalyah et.al (2016) dalam studinya tentang ‘Peran Stakeholder Pariwisata Dalam Pengembangan Pulau Samalona Sebagai Destinasi Wisata Bahari’ yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dengan cara berpartisipasi secara langsung dalam mengelola Pulau Samalona dengan menyediakan sarana pariwisata dan melayani wisatawan. Masyarakat juga aktif turut serta dalam mengikuti berbagai kegiatan operasional pantai seperti budidaya terumbu karang dan menjaga kebersihan pantai.

Selanjutnya terkait manfaat Wisata Bakaro Beach yang telah dirasakan oleh masyarakat sekitar kampung Bakaro, hasil penelitian menunjukan bahwa manfaatnya sangat dirasakan sebanyak 7 persen dan cukup dirasakan sebanyak 93 persen hasil menunjukan bahwa pilihan jawaban cukup dirasakan sebanyak 93 persen karena masyarakat turut mengelola, menjaga dan mendapatkan kesempatan merasakan wahana wisata yang ada di dalam Bakaro Beach.

Apakah lokasi wisata Bakaro Beach sudah menjadi status adat dari kampung yang dijadikan tempat berwisata. Hasil wawancara di lapangan menunjukan bahwa Bakaro Beach sudah menjadi wilayah adat sebanyak 7 persen, baru menjadi wilayah adat sebanyak 7 persen, belum menjadi wilayah adat sebanyak 23 persen dan tidak menjadi wilayah adat sebanyak 63 persen. Hasil menunjukan pilihan jawaban paling tinggi adalah tidak menjadi wilayah adat hal ini dikarenakan menurut pemilik kampung dan tua-tua adat disitu tanah

tersebut sudah di lepas dan di berikan untuk dijadikan tempat wisata dan sudah tidak menjadi wilayah adat dari pemilik hak ulayat setempat.

Terkait pemilikan hak ulayat atas kampung Bakaro dan tempat wisata Bakaro *Beach*, hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat memiliki hak sebanyak 7 persen, cukup memiliki hak sebanyak 33 persen, kurang memiliki hak sebanyak 10 persen dan tidak memiliki hak sebanyak 50 persen. Pilihan jawaban tidak memiliki hak ulayat atas Kampung Bakaro dan tempat wisata Bakaro *Beach* adalah persentase yang paling tinggi. Hal ini terjadi karena sebagian besar penduduk Kampung Bakaro adalah perantau dan masyarakat pendatang yang sudah tinggal cukup lama di Bakaro.

Kemudian terkait kompensasi yang di terima masyarakat kampung, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang berpendapat bahwa ada kompensasi sebanyak 4 persen, cukup ada kompensasi sebanyak 3 persen, kurang ada sebanyak 3 persen dan tidak ada kompensasi sebanyak 90 persen. Hal ini disebabkan menurut masyarakat sekitar sampai saat ini belum ada kompensasi atau bantuan yang di berikan kepada masyarakat sekitar baik dalam bentuk uang maupun barang. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Imanuel Guam tahun 2014 dengan judul skripsi “ Persepsi Masyarakat Terhadap Pengembangan Objek Wisata Tempat Pemanggilan Ikan Di Kampung Bakaro” dan Trianingsih Widiati tahun 2016 dengan judul skripsi “Analisis Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulungan”

Bentuk kompensasi yang di terima masyarakat sekitar wisata Bakaro *Beach*, hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi yang di terima dalam bentuk pekerjaan sebanyak 3 persen dan dan lain-lain sebanyak 97 persen. Hasil ini menunjukkan pilihan jawaban dan lain-lain sebanyak 97 persen karena memang selama ini belum ada kompensasi dalam bentuk apa pun terhadap masyarakat sekitar selaku penduduk yang tinggal di sekitar lokasi wisata Bakaro *Beach*.

Apa bila di tinjau dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Trianingsih Widiati tentang ‘Upaya Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah’ terdapat persamaan yaitu belum ada regulasi yang dapat mengatur pengembangan pariwisata di kabupaten Manokwari walaupun sudah melakukan promosi wisata di berbagai media massa, belum ada regulasi jelas tentang pengaturan retribusi objek wisata yang belum di manfaatkan untuk PAD kabupaten manokwari, keterbatasan anggaran pengembangan objek wisata, masyarakat juga terlibat dalam pengelolaan ojekt wisata, belum banyak investor yang tertarik membuka bisnis wisata di Manokwari.

Tabel 7. Infrastruktur atau Fasilitas yang ada di Objek Wisata Bakaro Beach

No	Fasilitas	Jumlah/ukuran	Keterangan
1	Wc	6	Unit
2	Kamar bilas	2	Unit
3	Tempat parkir	1/sedang	Unit
4	Kolam renang	1/sedang	Unit
5	Kolam renaang	1/kecil	Unit
6	Air/sumur	1	Unit
7	Lampu penerangan jalan	0	Unit
8	Pos keamanan	0	Unit
9	Kantin	6/sedang	Unit

Sumber: Data Primer diolah, 2019.

Kondisi infrastruktur yang menunjang pengembangan objek wisata Bakaro Beach dapat dilihat dalam tabel 7, seperti jalan masuk menuju objek wisata yang masih kurang baik, belum ada lampu penerangan jalan yang di siapkan pihak pemerintah agar menunjang pengembangan objek wisata ini, belum ada pos keamanan yang juga sangat membantu dalam pengembangan objek wisata dimana jika wisatawan sudah merasa aman maka akan dapat meningkatkan jumlah pengunjung wisatawan lagi yang dapt membantu meningkatkan pendapatan asli daerah kemudian ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti air yang sementara masih aman karena sumber berasal langsung dari sumur pribadi milik pengelola objek wisata, tempat parkir yang belum tersedia sehingga pengunjung juga sering memarkirkan kendaraannya pada tempat yang salah.

Pengembangan objek wisata perlu memperhatikan hal-hal ini seperti jika pemerintah bisa mengaspal atau memperbaiki jalan masuk agar bisa layak di gunakan yang memancing wisatawan untuk ke situ wisatawan yang awal hanya 50 sampai 100 dapat meningkat karena kondisi jalan yang sudah baik, lampu penerangan jalan sangat penting pemerintah harus memasang disepanjang jalan masuk menuju objek wisata agar aktivitas objek wisata dapat berlangsung hingga malam hari sehngga dapat menambah jumlah wisatawan dan jumlah pendapatan , pemerintah juga perlu memperhatikan tempat parkir bisa bekerja sama dengan pihak swasta pembuatan lahan untuk parkir agar lahan yang sementara di gunakan masih perlu di perluas dan perlu ada penambahan lahan parkir bukan hanya wisatawan yang datang dengan motor dan mobil dalam jumlah kecil dapat meningkat ke jumlah yang lebih banyak agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Wc dan kamar bilas saat ini masih dalam kondisi yang baik namun tidak menutup kemungkinan pemerintah meembangun beberapa unit lagi agar jika jumlah wisatawan meningkat wc dan kamar bilas yang di siapkan dapat digunakan semua.

Untuk pengembangannya pemerintah perlu merelokasikan dana sebesar Rp.1.000.000.000 milyar untuk pengembangan objek wisata Bakaro Beach mulai dari

perbaikan jalan masuk, pembangunan tiang dan lampu jalan, pembangunan pos keamanan, pembangunan dan penambahan lahan parkir, membangun serta menambah tempat berjualan atau kantin agar para pedagang dapat berjualan di sana dan masyarakat sekitar juga dapat berjualan di sekitar objek wisata, perbaikan dan penambahan fasilitas-fasilitas yang sudah ada dan yang masih kurang agar proses pengembangannya dapat terlaksana serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah juga harus membuat dan menetapkan aturan yang mengatur tentang pajak dan retribusi di setiap objek wisata yang dikembangkan agar dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manokwari.

Pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manokwari sebesar 112.138.721 ribu rupiah. Sedangkan pendapatan terbesar APBD berasal dari dana perimbangan dengan nilai 724.693.189 ribu rupiah dana perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nilai DAU kabupaten Manokwari sebesar 522.411.560 ribu rupiah sedangkan DAK sebesar 128.592.658 ribu rupiah (BPS Kabupaten Manokwari, 2019).

SIMPULAN DAN SARAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dinas pariwisata kabupaten Manokwari sampai dengan saat ini belum memiliki program pengembangan wisata yang rinci. Dalam pengembangan pariwisata dinas pariwisata kabupaten Manokwari telah melakukan pemasaran dan promosi terhadap objek wisata, akan tetapi belum ada regulasi yang jelas yang mengatur tentang pengelolaan objek wisata sampai pada saat ini kabupaten Manokwari, selain itu belum ada regulasi yang jelas yang mengatur retribusi objek wisata sehingga objek wisata belum dapat dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan PAD kabupaten Manokwari pemerintah telah melakukan kerja sama dengan masyarakat disekitar objek wisata kerja sama ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keamanan di lingkungan sekitar objek wisata. Langkah ini merupakan upaya pemerintah agar masyarakat menyetujui pemanfaatan lahan dalam pengembangan objek wisata Bakaro Beach pemerintah dalam hal ini dinas pariwisata mengajak masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat kabupaten Manokwari pada umumnya dapat berpartisipasi demi pengembangan dan keamanan objek wisata, hal ini membuat masyarakat merasa senang karena ikut merasa memiliki objek wisata tersebut.
2. Kondisi infrastruktur bagi pengembangan pariwisata di kabupaten Manokwari masih belum memadai. Sampai dengan saat ini belum ada pula fasilitas-fasilitas yang dibangun

pada objek wisata dan sekitarnya. Hal ini disebabkan adanya kendala antara lain muncul dari penggunaan dan status lahan yang akan dibangun.

Selanjutnya, saran yang dapat diberikan dengan hasil yang diperoleh melalui penelitian ini antara lain:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari, diharapkan dapat menyusun suatu kebijakan yang jelas mengenai pengelolaan objek wisata selain itu, pemerintah daerah juga perlu menetapkan regulasi terkait retribusi objek wisata sehingga potensi wisata yang ada dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Manokwari. Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari diharapkan lebih memperhatikan dan membangun infrastruktur pada objek wisata kabupaten Manokwari sehingga meningkatkan minat wisatawan untuk datang dan meningkatkan jumlah kunjungan wisata.
2. Bagi pihak swasta, diharapkan ikut terlibat dalam pemabangunan dan pengelolaan objek wisata dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan objek wisata diharapkan pihak swasta mampu melakukan upaya secara maksimal sehingga program pengembangan pariwisata di kabupaten Manokwari berjalan dengan baik untuk meningkatkan PAD.
3. Bagaimana masyarakat diharapkan tetap menjaga partisipasi dalam meningkatkan pengelolaan objek wisata di kabupaten Manokwari, masyarakat dapat membantu menciptakan suasana yang nyaman, bersih, dan aman disekitar objek wisata. Hal ini diperlukan agar objek wisata menjadi lebih menarik lagi bagi pengunjung.

REFERENSI

- Amalyah, R. et al. 2016. Peran Stakeholder Pariwisata Dalam Pengembangan Pulau Samalona Sebagai Destinasi Wisata Bahari. *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol. 37 No. 1.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari. 2019. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Manokwari Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah) Tahun 2016-2017. Manokwari: Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari.
- Defilora, 2012. Rencana Pengembangan Objek Wisata Permandian Air Dingin Lubuk Minturun Kota Padang, Universitas Andalas
- Irhamna, S.A. 2017. Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Perekonomian Masyarakat Sekitar Objek Wisata di Dieng Kabupaten Wonosobo. *Economic Development Analysis Journal* Vol. 6 No. 3.
- Kurey, A.J., dkk. 2019. *Potensi Jasa Lingkungan Pada Kawasan Taman Wisata Alam Klamono, Kabupaten Sorong*. *Jurnal Kehutanan Pampusiana*. Vol. 5 No. 2.
- Novi Yanti, 2018. *Analisis Pengembangan Sektor Pariwisata di Kota Padang*. *Journal of Economics and Management Sciences* Vol. 1 No. 1 December 2018.
- Sari, E.L.P., & Widiyastuti, D. 2020. *Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Kampung Wisata Rejowinangun Kotagede Yogyakarta*. *Jurnal Bumi Indonesia* Vol. 9 No. 1.
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian*. Bandung :Alfabeta.
- Widiati, Trianingsih. 2016. Upaya Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulungan. Master thesis, Universitas Terbuka.